

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, Menguak Teori *Hukum (Legal Theory)* & Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Undang-Undang (*Legisprudence*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288.

Adilan Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Edisi I, cetakan keempat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 149.

Alfan Miko (Ed.), 2006, Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat, Andalas University Press, Padang, hlm. 187.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2018, hlm. 14.

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Cetakan ke-16, Jakarta, 2016, hlm. 116-117.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Genta Publishing, Semarang, 2009, hlm. 17.

Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002. hlm. 80

CST Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385. Deassy J. A. Hehanusa, dkk, Metode Penelitian Hukum, Widina, Bandung, 2023, hlm.ii.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Erza Putri, *Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*, hal 49.

Fernando M. Manullang, Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 95.

Gunawan Widjaja, 2007, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (*Aanvullend Recht*) dalam Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.249.

Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Herlien Budiono II), hlm.3.

Imam Sudiyat, *Hukum Adat (Sketsa Asas)*, Yogyakarta: Liberty, 2007. Hlm. 28

Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang, Kajian sosio-legal*, Edisi Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 121.

John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 37

Nurhasnah Ismail, *Perkembangan hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, UGM Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 39-41.

M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I FE UI, Jakrta, 1996, hlm. 203.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Bandung, 2010, hlm. 140.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137.

Salim.H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.161.

Salim HS, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 9.

Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

Sidartha, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Utomo, Bandung, 2006, hlm. 85.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 160.

Sudikno Mertokusumo, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010, hlm. 290.

Soebekti Poespondo, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginnselen En Stelsel Van Hat Adat Recht)*, Terjemahan, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm. 210

Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 86.

Soerjono Soekanto, B, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 1.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 127.

Soerojo Wignojodipoero, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: Alumni. 1980, hlm.11

Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, hlm.1.

Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.132

Utrecht, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2006, hlm. 847.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Daerah Provinsi No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfatannya.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.

C. Jurnal

Anisa Nurul Hidayah, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jurnal Ilmu Multidisiplin Volume 3 No 1 (2025) E-ISSN 2541-2332, hal 297.

Areini Airin Mokoagow, *Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Jual Beli Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*. Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017, hal 22.

Biyan Marco Christian Solukh, *Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak Milik dalam Jual Beli Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang*, Volume1,Nomor 1, P-ISSN:, E-ISSN:, 2023.

CST. Kansil. 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm.119 <http://www.klinik-pajak.com/knowledge-base/bphtb> <http://siaksoft.net/?p=475>, di akses tanggal 18 april 2026, pukul 19.05 wib

Diah Anggraeni Ndaomanu, *Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.51, No.4, 2021 hlm. 991.

Dicky Suhandoko, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Peserta Program Perkebunan Inti Rakyat Pola Pir-Trans Desa Sungai Melayu Jaya Kalimantan Barat Tahun 1995-2021, JEKOBS Vol. 2, No. 1, 2023, hlm 64

Imelda Fitria Labiah, Indana Zulfa Hasanah, dan Muhammad Arya Yalhan, "Peran Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat" Customary Law Journal, Vol. 1 No 2, 2024, hlm 6.

Indra Iryani Dewiyanti, Hubungan Implementasi Program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) Kelapa Sawit dengan Produktivitas dan Pendapatan Petani Plasma (Suatu Kasus Pada Petani Peserta Program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN) Kelapa

Sawit di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara), PASPALUM Vol 5, Nomor 2, 2017, hlm 7.

Khadijah dkk., 2023, "Pendaftaran Pemindahan Hak Atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam 'Keadaan Tertentu' Menurut PP No. 24/1997", Collegium Studioun Journal, Vol. 6 No. 1, STIH Awang Long, hlm. 107

Ni Nyoman Putri Satrianingsih dan A.A Ngurah Wirasila, Peralihan Hak Milik Tanah Melalui Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan, Universitas Udayana, *Journal Ilmu Hukum*, Vol 7, No 6, Bali, 2019, hlm 8.

Ramadhani Alfin Habibie, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 10 No.1 Tahun 2019, hlm 112.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 16, No. 1, 2020, hlm. 88.

